

KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MEMPERBAIKI SANITASI DAN AIR BERSIH DI PAPUA MELALUI sAIIG PERIODE 2014-2016

Reni Trijayanti¹
Nim. 11902045165

Abstract

The results showed Indonesia and Australia Cooperation in Improving Sanitation and Clean Water in Papua Through sAIIG Period 2014-2016 is need program and technical support, budget assistance and collaboration with organizations with other international organizations or actors. Then the programs are finally realized by the ministry of general workers and various other stakeholders, while the Australian side only emphasizes the political aspect which includes discussion at coordination meetings and support programs. Then collaboration with international organizations is a meeting point between the two that ultimately make a positive contribution in the development of sanitation and clean water, although not yet be a fundamental solution.

Keywords : Sanitation and Clean Water, Indonesian-Australia

Pendahuluan

Salah satu bentuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur Australia di Indonesia diwujudkan pada sektor sanitasi dan penyediaan air bersih, yang dijalankan melalui sAIIG (*Australian-Indonesia Infrastructure Grants For Sanitation*), yang secara hirarkis merupakan bagian dari bantuan/hibah luar negeri Australia di bawah Ausaid (*Australian Aid*). sAIIG dibentuk pada tahun 2012 sebagai perluasan dari misi Ausaid di Indonesia bersama dengan program lainnya, dengan tujuan akhir tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Misi sAIIG di Indonesia tidak lepas dari berbagai persoalan tentang sanitasi dan air bersih yang terjadi karena berbagai faktor, diantaranya rendahnya pengetahuan dan pemahaman sebagian masyarakat Indonesia tentang kebersihan ekosistem air dan lingkungan, anggaran pembangunan, hingga faktor geografis yang memiliki akses air bersih yang terbatas.

Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2000-2005 Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dengan kondisi sanitasi dan air bersih terburuk. Peringkat ini terus memburuk dimana pada tahun 2006-2010 Indonesia menduduki peringkat kedua dunia.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: renitrijayanti47@gmail.com

Publikasi yang dikeluarkan WHO ini didasarkan pada berbagai kajian, penelitian dan parameter/standarisasi, diantaranya ketersediaan air baku, kelestarian ekosistem, ancaman penyakit endemik, tata kelola sistem pembuangan terpadu, partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan. Dari keseluruhan indikator yang digunakan, indikator partisipasi masyarakat serta pemerataan pembangunan menjadi faktor yang dominan yang menyebabkan buruknya sanitasi dan air bersih di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari data yang dikeluarkan *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2011, bahwa terdapat sekitar

Faktor kebiasaan ini turut menyebabkan ketidak seimbangan daya tahan (absorpsi) tanah untuk menampung limbah manusia. Kemudian pada wilayah yang bukan perkotaan (wilayah rural) buruknya sanitasi dan ketersediaan air bersih di Indonesia banyak di pengaruhi oleh rendahnya pemahaman hidup bersih dan sehat berkaitan dengan aktifitas masyarakat, khususnya mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Keberadaan Papua sebagai provinsi di Indonesia dengan tingkat sanitasi dan ketersediaan air bersih yang buruk ternyata tidak mengalami perubahan sejak tahun 2005. Papua hanya memperoleh indeks sebesar 45 dari ketentuan standar nasional Bappenas sebesar 70 mengenai sanitasi dan air bersih. Standarisasi ini melalui kajian *bottom to top*, yaitu berbagai masukan dari penelitian akademisi, Bappeda, organisasi non-pemerintah, diantaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang kemudian ditindak lanjuti oleh Bappenas. Indikator buruk, menengah dan baik ini akan dievaluasi setiap tahunnya yang juga menjadi rekomendasi bagi *stakeholder*, khususnya pemerintah daerah.

Pada tahun 2007-2013 persoalan tentang buruknya sanitasi dan air bersih di wilayah Papua masih menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh para pemangku kepentingan di wilayah ini. Dari data yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Papua pada tahun 2005 masyarakat yang gagal memiliki akses air bersih baku, baik dari sumur artesis ataupun dari pipanisasi hanya sekitar 21,8% atau sekitar 786 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2013 ternyata angka ini tidak bertambah secara drastis, hanya sekitar 29,2 atau setara dengan 980 ribu orang yang hanya dapat mencapai akses ke air bersih. Ini juga berlaku bagi sistem sanitasi yang masih menjadi persoalan serius karena belum terselesaikan karena dari seluruh masyarakat Papua yang memiliki kasus hanya sekitar 910 ribu orang pada tahun 2013, sedangkan di tahun 2007 jumlahnya jauh lebih kecil hanya sekitar 710 ribu jiwa.

Kemudian kondisi ini tidak kunjung membaik yang pada akhirnya mendorong Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk memberikan laporan terkini kepada pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan juga ditembuskan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk memprioritaskan pembangunan sanitasi dan air bersih. Kemudian pada tahun 2014 proposal ini berhasil disetujui bersamaan dengan sAIIG Australia .

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Kerjasama Bilateral Fungsional

Menurut pendapat James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff kerjasama dapat muncul dari kesepakatan masing-masing individu (atau negara) mengenai kesejahteraan bersama atau sebagai akibat persepsi kepentingan sendiri. Kunci dari perilaku yang mengarah pada kerjasama terletak pada kepercayaan masing-masing pihak (masing-masing negara) bahwa pihak lain juga akan melakukan kerjasama, dimana masalah utama yang muncul dari perilaku ini adalah kepentingan nasional masing-masing negara. Bila mengarah pada persamaan kepentingan nasional maka kerjasama yang di inginkan akan tercapai.

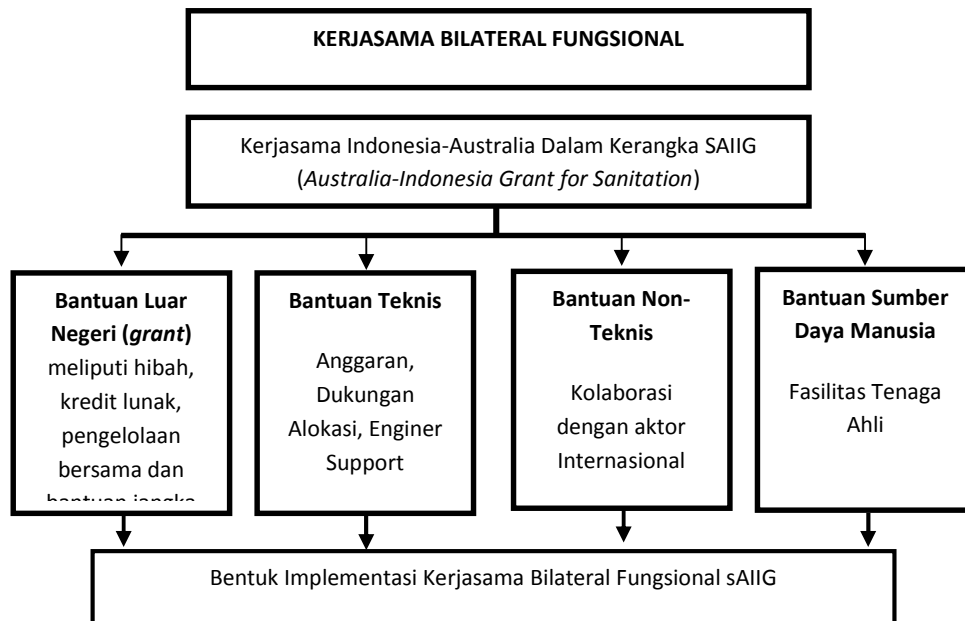
Kerjasama internasional muncul dalam empat bentuk, yaitu kerjasama global, kerjasama regional, kerjasama ideologis dan kerjasama fungsional. Kemudian secara khusus terkait kerjasama fungsional, salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama bidang sosial. Lebih lanjut Dougherty mengatakan bahwa kerjasama bidang sosial adalah inisiatif dari negara donor dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi. Kerjasama fungsional pada bidang sosial umumnya terealisasi melalui empat hal, yaitu :

- a. Pengalokasian bantuan luar negeri (*grant*), baik hibah, kredit lunak, pengelolaan bersama (*joint operational project*) ataupun pinjaman jangka panjang.
- b. Pengalokasian bantuan teknis yang diwujudkan melalui alih teknologi, dukungan peralatan sistem sewa ataupun hibah, hingga pembangun infrastruktur secara bersama-sama.
- c. Pengalokasian bantuan non-teknis yang diwujudkan melalui program-program yang sifatnya non fisik, diantaranya kampanye (*campaign*), promosi ataupun edukasi kepada entitas-entitas dalam suatu masyarakat.
- d. Pengalokasian bantuan sumber daya manusia yang diwujudkan melalui pengiriman tenaga ahli.

Kerjasama fungsional dikatakan tidak mungkin terselenggara apabila diantara negara mitra kerjasama ada yang tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang diharapkan darinya oleh yang lain. Dengan demikian, dalam hubungan kerjasama fungsional dibutuhkan satu pihak yang lebih superior dari mitra, yang memainkan peranan sebagai penolong kepada mitra lainnya

Kemudian aspek penting dari bentuk kerjasama fungsional ini adalah negara yang menjalin kerjasama yang umumnya hanya dua negara (*bilateral agreement*), yang dapat menggunakan sumber daya yang ada, baik alat, teknologi, sumber daya manusia, tenaga ahli, personel militer dan lain-lainnya.

Untuk melihat pola jawaban terhadap rumusan masalah dengan menggunakan konsep/teori, maka disajikan model analisa sederhana berikut



Kerjasama Indonesia dan Australia dalam memperbaiki sanitasi dan penyediaan air bersih di wilayah Provinsi Papua tahun 2014-2016 melalui sAIIG merupakan bentuk dari kerjasama bilateral fungsional pada bidang sosial. Kerjasama ini dilakukan dalam 4 (empat) pola bantuan yang diberikan oleh Australia sebagai mitra superior kepada Indonesia untuk meningkatkan kualitas pada sektor sanitasi dan air bersih.

Metodologi Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu teknik pengumpulan dan pengolahan data sekunder dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan data-data dari internet yang tingkat kapabilitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan validitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil Penelitian

Kondisi Sanitasi dan Air Bersih di Provinsi Papua

Air bersih dan sanitasi yang sehat merupakan dua komponen yang saling terintegrasi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Sejak lama masyarakat Indonesia memang sangat bergantung pada sumber air dari sumur artesis ataupun dari mata air, sungai, danau dan sumber air lainnya yang terletak di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dalam perkembangannya masalah penyediaan air bersih kemudian muncul karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terjadinya pencemaran hingga adanya pengaruh musim yang menyebabkan kualitas dan kuantitas air menjadi terganggu.

1. Keadaan Sanitasi dan Air Bersih di Indonesia

Sanitasi dan air bersih menjadi dua hal yang tidak dipisahkan. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) air bersih merupakan mekanisme manusia/masyarakat untuk akses air bersih dari sumber air baku ataupun air sekunder, sedangkan sanitasi merupakan sistem pengelolaan air limbah atas kegiatan manusia/masyarakat. Dengan demikian air bersih merupakan input dari

kegiatan manusia/kelompok masyarakat, sedangkan sanitasi merupakan mekanisme yang dikeluarkan (*output*) atas kegiatan tersebut dengan menggunakan air bersih. Dengan kata lain, air bersih merupakan konsumsi atas kegiatan dan kehidupan manusia, sedangkan sanitasi merupakan dampak/linhas atas kegiatan tersebut.

Menurut data publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia bersama dengan Tanoto Foundation di tahun 2009, 45% dari penduduk pedesaan di Indonesia hidup di dalam lingkungan yang tidak baik untuk kesehatan, di mana mereka tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya yang mencapai 49%. Kondisi ini diperkirakan hingga tahun 2014 akan terus berkembang secara fluktuatif karena meskipun pemerintah bersama dengan *stakeholder* lainnya proaktif dalam mendukung pembangunan air bersih dan sanitasi, namun pencemaran dan iklim yang sulit untuk diprediksi membuat kualitas air bersih dan sanitasi juga berkembang semakin parah.

Persoalan tentang buruknya sanitasi dan ketersediaan air bersih di Indonesia kemudian menyebabkan kondisi yang menunjukkan anggota masyarakat terhadap berbagai resiko kesehatan. Di lain pihak, di dalam masyarakat yang sehat, tercipta lingkungan yang kondusif untuk berbagai kegiatan, termasuk kegiatan bisnis. Beberapa masalah kesehatan yang secara langsung diakibatkan diantaranya diare yang disebabkan coliform, escheria coli dan fecal coli, serta muntaber. Sedangkan beberapa penyakit muncul yang disebabkan oleh air dan sanitasi yang buruk, diantaranya Polio, Filiarisis (Kaki Gajah) dan Kanker.

Data hasil pemantauan Pusarpedal KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan BLH (Badan Lingkungan Hidup) di seluruh Indonesia (2010 – 2016), kualitas air sungai-sungai besar dalam kondisi tercemar berat yang diakibatkan oleh buangan limbah industri, rumah tangga, pertanian dan lain-lain. Pencemaran ini mengakibatkan kurangnya pasokan air bersih untuk masyarakat. Sedangkan PDAM secara rata-rata nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan 70 % konsumen. Selebihnya masyarakat memanfaatkan air sumur yang ternyata juga telah tercemar oleh yang namanya bakteri e-coli. Pihak yang paling menderita akibat kurangnya air bersih tentu saja masyarakat miskin perkotaan karena ekosistem yang lebih parah tingkat pencemarannya, jika dibandingkan wilayah rural (pegunungan Papua) yang memiliki sumber daya air yang relatif memadai dan baik, meskipun berada pada jarak yang cukup jauh dengan pemukiman. Diperkirakan sekitar 80 % masyarakat miskin perkotaan tidak mendapatkan akses air bersih dan bahkan harus membayar lebih mahal.

2. *Keadaan Sanitasi dan Air Bersih di Provinsi Papua*

Persoalan ketersediaan air bersih dan sanitasi sehat hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, namun beberapa wilayah yang terburuk adalah Provinsi Papua bersama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung dan Kalimantan Tengah. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini beberapa wilayah dengan sanitasi dan sistem air bersih yang buruk tahun 2013.

Maka salah satu wilayah dengan tingkat sanitasi dan ketersediaan air bersih terburuk di Indonesia adalah Provinsi Papua. Pemingkatan ini didasarkan pada standarisasi Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang mengacu pada beberapa parameter, diantaranya ketersediaan kakus/jamban (*water closet*), budaya hidup bersih, tata laksana teknis pembangunan, kondisi sumber daya air baku, ekosistem lingkungan. Buruknya sistem sanitasi dan ketersediaan air bersih di Papua dapat dilihat dari presentase rumah tangga yang memiliki jamban yang hanya sekitar 28,04%. Ibu kota Papua, Jayapura ternyata memiliki masalah serius dalam sistem sanitasi dan ketersediaan air bersih. Hampir lebih dari 80% masyarakat tidak terbiasa untuk mencuci tangan sebelum makan, serta adanya kelompok masyarakat perkotaan yang memiliki kebiasaan buang air diselokan atau sungai. Sedangkan masyarakat di pedalaman melakukan aktifitas buang air besar di danau atau tanah yang kemudian akan mencemari lingkungan.

Berdasarkan kajian BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Provinsi Papua persoalan ketersediaan air bersih dan sanitasi sehat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Budaya hidup bersih yang relatif rendah.
Sebagian masyarakat di wilayah Papua menggunakan ekosistem sungai dan danau untuk aktifitas mandi, cuci dan kakus. Kemudian sebagian lainnya menggunakan ekosistem ini untuk membuang sampah, baik organik ataupun non-organik. Ini kemudian menyebabkan tercemarnya ekosistem air yang menyebabkan berkembangnya wabah penyakit diantaranya diare dan wabah penyakit lainnya. Beberapa wilayah di Papua yang memiliki budaya hidup bersih yang belum cukup baik, diantaranya Asmat, Mappi, Mimikika, Memberamo dan beberapa wilayah lainnya.
- b. Ketergantungan yang besar masyarakat Papua terhadap sumber air baku sungai dan rawa. Persoalan ini muncul ketika air baku sungai dan rawa mengalami penurunan akibat pencemaran dan tingginya kebutuhan air sehingga tidak memadai dalam aspek deman dan suplay. Persoalan ini terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Papua, diantaranya wilayah Jayapura dan Abepura yang berada di sekitar Danau Sentani. Kasus ketergantungan lainnya juga terjadi di wilayah Dogiyai dan Deiyai yaitu sekitar Danau Tigi yang menjadi tumpuan hidup masyarakat sekitar untuk memperoleh akses air bersih dan aktifitas mandi, cuci dan kakus.
- c. Kualitas air galian artesis rendah dan menengah yang tidak memadai.
Pembangunan sumur dalam di beberapa wilayah di Provinsi Papua, sebagian besar berada di wilayah urban, diantaranya Mimikia, Jayapura ataupun Abepura. Beberapa persoalan yang muncul adalah pencemaran, dimana di wilayah sumber air ini menjadi instalasi sanitasi yang tidak sehat ataupun adanya resapan pencemaran akibat sktruktur lahan gambut.
- d. *Political will* yang lemah dalam pengalokasian anggaran, prioritas pembangunan dan serapan dana pembangunan.
Persoalan ini memang terjadi di beberapa daerah pasca penerapan otonomi daerah. Prioritasi bidang-bidang lainnya, diantaranya pendidikan, kesehatan

dan layanan publik menjadikan pengembangan sistem air bersih dan sanitasi kurang mendapatkan prioritas yang optimal di wilayah Provinsi Papua.

- e. Karakteristik geografis yang (*sheer area*) yang menyebabkan sulitnya jaringan penyaluran air bersih.
Provinsi Papua merupakan wilayah dengan *landscape* yang lengkap, dimana terdapat dataran rendah, pantai hingga pegunungan tertinggi di dunia (Jayawijaya). Kemudian kondisi ini diperperat dengan penyebaran penduduk yang tersebar di wilayah-wilayah yang sulit untuk dilakukan pipanisasi, seperti halnya Kabupaten Mapi, Nduga, Pegunungan Bintang dan beberapa wilayah lainnya.

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Sanitasi dan Air Bersih di Provinsi Papua

Penanganan masalah sanitasi dan penyediaan air bersih di wilayah Papua yang semakin menjadi prioritas bersamaan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di wilayah Papua. Melalui undang-undang ini Provinsi Papua memperoleh beberapa kesetimewaan berkaitan dengan dana perimbangan, diantaranya pajak sumber daya kehutanan, perikanan, pertambangan sekitar 80% yang nantinya dapat meningkatkan APBD Provinsi Papua.

Pembangunan sanitasi dan air bersih masih menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Kesenjangan perekonomian yang terjadi khususnya antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa tidak dapat terbantahkan. Khususnya di Papua, kesenjangan perekonomian masih terlihat dengan jelas. Dari segi infrastruktur, belum adanya jalan yang memadai, menyebabkan ongkos distribusi kebutuhan pokok di Papua semakin mahal, sehingga meningkatkan harga jual di masyarakat. hal tersebut, berupaya ditanggulangi oleh pemerintah salah satunya dengan pembangunan jalan trans Papua. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp12,5 triliun untuk menyelesaikan jalan trans Papua. Dana tersebut untuk membangun jembatan dan jalan sepanjang 900 km. Presiden Jokowi mengatakan, bahwa pemerintah tahun ini memberikan dana Rp6 triliun ke Papua. Untuk jembatan dan jalan Rp4,7 triliun, untuk pengairan irigasi Rp600 miliar, untuk sanitasi dan air minum Rp400 miliar dan untuk perumahan Rp300 miliar.

1. Program Hibah Air Minum merupakan program hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berbasis kinerja dan telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan menghasilkan lebih dari 500.000 Sambungan Rumah Baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama ini telah dilaksanakan untuk menangani wilayah perkotaan melalui peran aktif Pemda dan PDAM di wilayah Papua.
2. Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum yang dimaksud di sini adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik yang bersumber dari pendapatan murni APBN atau pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Hibah Air Minum ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada pemprov atau pemkab/pemkot untuk dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di daerahnya. Pelaksanaan Program Hibah Air Minum akan menggunakan mekanisme sesuai

dengan PMK No. 188/PMK.07/2012 tentang *Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah* dan/atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Program ini akan dikelola oleh Komite Pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta dibantu oleh *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Provincial Project Management Unit* (PPMU). Kabupaten/Kota yang akan mendapatkan dana hibah program ini, perlu membentuk tim *Project Implementation Unit* (PIU) yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah Papua.

Permasalahan pasokan air bersih terutama masih terjadi di daerah perdesaan. Ketersediaan air bersih di daerah perdesaan saat ini belum merata sehingga jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam pemenuhan 17 target tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) pada 2030. Oleh karena itu, Pemerintah tetap meminta berbagai kontribusi dari masyarakat serta pihak swasta sangat diperlukan dalam sistem penyediaan air minum serta sanitasi. Dalam hal ini, seperti pembangunan sambungan rumah air dari jaringan distribusi air minum, dan pembangunan jamban keluarga. “Untuk memenuhi target 100% akses air bersih dan sanitasi, pemerintah juga akan mendorong kerja sama dengan badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang sistem penyediaan air minum di wilayah Provinsi Papua.

Sampai dengan tahun 2009 berbagai strategi pembangunan sanitasi dan air bersih belum dapat terselesaikan secara optimal. Beberapa persoalan yang dianggap sebagai masalah terberat diantaranya sistem IPA (instalasi pengolahan air) sederhana pada kelompok rumah tangga ataupun usaha kecil, diantaranya rumah makan, sekolah dan lain-lainnya yang tidak melalui septitank, namun dialirkan pada tempat-tempat yang lebih rendah yang menyebabkan pencemaran air pada tingkat lokal/lingkungan.

Masalah keterediaan air bersih dan sanitasi sehat menjadi persoalan yang tidak kunjung terselesaikan karena berkembangnya masalah teknis, diantaranya tercemarnya sumber air baku, hingga IPA yang tidak memadai, kemudian masalah non-teknis diantaranya karakteristik geografis adanya romte area dan lain-lainnya. Kondisi ini kemudian dihadapkan pada dukungan pemerintah pusat melalui kerjasama luar negeri, seperti halnya Australia melalui program sAIIG.

Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menangani Masalah Sanitasi dan Air Bersih di Provinsi Papua

Hubungan antara Indonesia-Australia yang telah melalui serangkaian sejarah panjang, bahkan sebelum Indonesia merdeka kemudian dihadapkan pada penyelesaian berbagai persoalan yang bersifat teknis, diantaranya adalah bantuan luar negeri dalam penyediaan sanitasi dan air bersih. Pencapaian ini sekaligus melengkapi kerjasama-kerjasama teknis sebelumnya, baik pada bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur hingga keamanan (*human security*).

Tujuan kerjasama Indonesia dan Australia adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional, baik pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan beberapa bentuk kepentingan lainnya. Kepentingan Australia atas hubungan bilateral dengan Indonesia

dan juga sebaliknya adalah untuk mengembangkan *good-neighborliness*, adanya peluang untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan serta terdapatnya instrumen legal/normatif antara lain *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* (2005) serta *Lombok Treaty* (2006). Deklarasi *Comprehensive Partnership* memuat *roadmap* bagi pengembangan hubungan bilateral ke depan (*expand and deepen*) antara Indonesia dan Australia melalui forum-forum konkrit seperti IAMF (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*). Sementara itu, *Lombok Treaty* memuat prinsip-prinsip penting, seperti penghormatan terhadap kedaulatan nasional, integritas wilayah serta komitmen kedua negara untuk tidak membiarkan wilayah masing-masing dijadikan sebagai *staging point* untuk mengusung tujuan separatisme.

Berkembangnya kerjasama Australia dan Indonesia di berbagai bidang kemudian mengalami perkembangan (*enlarging cooperations*) ke pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khususnya diantaranya sAIIG yang merupakan skema perluasan kerjasama teknis antara Indonesia dan Australia. Secara politis tujuan utama sAIIG adalah untuk membangun inisiatif dan reformasi melalui berbagai rekomendasi dan masukan kepada pemerintah Indonesia agar dapat membentuk sebuah sistem pengelolaan dan pembangunan sanitasi dan air bersih secara efektif.

Tujuan akhir dari sAIIG adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama kedua negara untuk meningkatkan kapasitas kebijakan, perencanaan dan investasi infrastruktur pada bidang sanitasi dan air bersih. Nantinya melalui sAIIG akan terbentuk kerjasama-kerjasama antara Indonesia dan Australia secara lebih intensif. Program sAIIG di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, meliputi :

- a. Dukungan program sanitasi dan air bersih.
- b. Hibah anggaran sanitasi dan air bersih.
- c. Konsorsium organisasi dan kerjasama internasional.

Memberikan Dukungan Program dan Teknis sAIIG Dalam Mendukung Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih di wilayah Papua Melalui Program dan Teknis

Dukungan program dan teknis oleh AUSAID dalam program sAIIG diwujudkan melalui beberapa pencapaian, yaitu :

- a. Dukungan AUSAID dalam program sAIIG melalui penyusunan dan pengesahan regulasi atau aturan formal yang memiliki kekuatan hukum, dimana pihak Australia memberikan berbagai masukan secara teknis/rekomendasi, sedangkan pembahasan hingga disahkan regulasi tersebut tetap dirancang dan disahkan oleh para stakeholder Indonesia untuk dapat menciptakan sistem sanitasi yang legitimet menurut hukum positif di Indonesia. Menurut Perpres No 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPAMS), sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengolahan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksana dan pengawasan yang baik. Perencanaan sanitasi adalah dokumen yang

- meliputi peta jalan (*roadmap*) sanitasi nasional, peta jalan (*roadmap*) sanitasi provinsi, dan strategi sanitasi kabupaten/kota untuk dapat digunakan di wilayah Papua.
- b. Dukungan AUSAID dalam program sAIIG melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK), termasuk di wilayah Papua. SSK merupakan dokumen cetak biru berisi pembangunan sanitasi sebuah kota/kabupaten yang komprehensif. Program ini diresmikan tahun 2009 oleh Wakil Presiden Budiono dalam deklarasi yang dikeluarkan pada Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) II. PPSP diarahkan pada 3 sasaran, meliputi menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2014, di perkotaan dan pedesaan, pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan, serta pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 hektar. Program ini juga untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs), khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDGs, yakni mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015, termasuk di wilayah Papua.
 - c. Dukungan AUSAID dalam program sAIIG melalui AIIRA. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui *Indonesia Infrastruktur Initiative* (IndII). Dari kerjasama kedua negara tersebut, merilis laporan akhir inovasi penelitian terapan di sektor air minum dan sanitasi yang memaparkan hasil penelitian *Australia – Indonesia Infrastructure Research Awards* (AIIRA). AIIRA tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebijakan, perencanaan dan kegiatan infrastruktur di seluruh sektor air dan sanitasi di Indonesia, termasuk Papua melalui penelitian kolaboratif. Inovasi penelitian yang terdapat dalam laporan tersebut meliputi: perbaikan infrastruktur irigasi, kontrak sosial dan tata kelola air minum, penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan serta penggunaan aplikasi berbasis web untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk wilayah Papua.
 - d. Dukungan AUSAID dalam program sAIIG melalui hibah berbasis hasil”(*Output Based Aid*, OBA). Proses ini memaksa institusi daerah untuk menciptakan kondisi melalui kebijakan, staf dan pelaksanaan demi untuk penyediaan layanan yang berkelanjutan. Lewat pelaksanaan program OBA, lembaga lokal didorong untuk menciptakan kondisi - melalui kebijakan, personel, dan implementasi - untuk penyediaan layanan berkelanjutan. Program OBA yang didukung IndII, telah menunjukkan peningkatan kemampuan untuk memanfaatkan dana, transfer risiko, dan mengembangkan layanan di sektor ini. IndII di sektor air minum dan sanitasi meliputi program hibah berbasis hasil Air Minum dan Sanitasi, Hibah Infrastruktur untuk sanitasi Kemitraan Australia – Indonesia, serta pengembangan kapasitas dengan kontrak sosial di Indonesia bagian timur, termasuk di wilayah Papua.
 - e. Mekanisme sAIIG melalui hibah berbasis hasil (*Output Based Aid*, OBA) dijalankan oleh para stakeholder Indonesia dan Australia. Program ini dijalankan dengan staff asing dan pelaksana yang berasal dari Australia sampai dengan rapat

koordinasi di tingkat provinsi. Sedangkan penerapan di lapangan di Provinsi Papua dijalankan oleh Kementerian PU dan konsultan pendukung yang nantinya akan menerapkan laporan pertanggung-jawaban ke kementerian Pekerjaan umum pusat dan AUSAID.

Memberikan Bantuan Anggaran Dalam Mendukung Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih di wilayah Papua Melalui Bantuan Anggaran

Bantuan anggaran menjadi bentuk dukungan penting bagi Australia kepada Indonesia. Keberadaan Australia sebagai negara maju dilihat dari GDP (*gross domestic product*) yang mencapai 1,37 triliun US Dollar dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 rata-rata 3,4 hingga 4,2% pertahun menjadikan negara ini tumbuh sebaga negara maju di bidang ekonomi.

Kemitraan luas Australia dan Indonesia yang luas mencakup politik, keamanan, perdagangan, ekonomi dan kerja sama pembangunan. Kemitraan ini ditopang oleh hubungan antar-warga dan kelembagaan yang substansial. Indonesia juga telah berkembang menjadi mitra dagang terbesar kami yang ke-12. Lokasi, geografi dan demografinya memberi Indonesia peran geopolitik dan strategis yang penting di kawasan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia menguntungkan Australia dan memberi sumbangsih pada pertumbuhan dan kestabilan kawasan. Pemerintah Australia diperkirakan akan memberikan total Bantuan Pembangunan Luar Negeri sebesar A\$375.7 juta kepada Indonesia pada 2015-16, termasuk prakiraan pendanaan bilateral sebesar A\$323 juta yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT).

Dukungan Program dan Teknis sAIIG Dalam Mendukung Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih di wilayah Papua Melalui Kolaborasi Dengan Aktor Internasional

Kolaborasi yang dijalankan AUSAID dalam program sAIIG di wilayah Papua menunjukkan bahwa masalah ini cenderung sulit untuk hanya diselesaikan oleh pemerintah Australia sendiri. Selain itu, persoalan sanitasi air bersih juga menjadi fokus atau tujuan penting dari organisasi internasional lainnya sehingga ini menjadi titik temu pencapaian bersama. Beberapa organisasi ini adalah ADB, Bank Dunia, JICA dan USAID.

1. ADB (Asian Development Bank)

ADB (*Asian Development Bank*) merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, mendukung investasi, dan memberikan kerja sama teknis (*technical assistance*) kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. ADB merupakan lembaga negara, yang anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari berbagai negara. ADB juga merupakan organisasi regional, karena aktivitas-aktivitas dititikberatkan di wilayah Asia. Sebagian besar struktur permodalannya bersumber dari negara-negara Asia, begitu pula pemilihan pimpinan (*president*) serta delapan dari dua belas dewan direksinya. Selain itu, ADB juga beranggotakan negara-negara non Asia, yang sangat banyak membantu permodalan ADB, serta dalam struktur organisasi diwakili melalui beberapa anggota dewan direksi dan para stafnya. Kenyataan inilah yang menyebabkan ADB tidak hanya merupakan sebuah organisasi Asia, melainkan sebuah institusi dengan wawasan seluruh dunia.

Keterlibatan ADB dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, khususnya sanitasi dan air bersih dijalankan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

- a. Memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan, dengan memprioritaskan wilayah dan sub-wilayah Asia, berupa berbagai proyek dan program regional yang berperan secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang selaras di wilayah tersebut secara keseluruhan. Dan yang sangat diutamakan adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara-negara yang sulit berkembang di wilayah Asia.
- b. Memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan mereka dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki, menyehatkan perekonomian, dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di antara negara-negara Asia sendiri.
- c. Memberikan bantuan teknis (*technical assistance*) untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan, termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu.

2. Bank Dunia (World Bank)

Bank dunia didirikan pada konferensi internasional di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada Juli 1944. Konferensi ini diselenggarakan untuk membentuk suatu kerangka kerja sama dan pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan perekonomian global yang lebih stabil dan makmur. Meskipun tujuan ini tetap menjadi inti, ruang lingkup tugas kedua lembaga tersebut terus berevolusi seiring berbagai perkembangan dan tantangan baru dalam ekonomi.

Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengurangan kemiskinan dengan menyediakan bantuan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara dalam mereformasi sektor-sektor tertentu atau menjalankan proyek-proyek spesifik, seperti membangun sekolah dan pusat kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan menjaga lingkungan.

Kerjasama antara Australia dan World Bank dalam pembangunan dan pengembangan sanitasi dan air bersih di wilayah Papua berhasil mencapai beberapa pencapaian yaitu terbentuknya hibah internasional berupa pembiayaan ringan jangka panjang. Ini menjadi sangat menguntungkan ketika APBN dan APBD cukup terbatas, sedangkan persoalan sanitasi dan air bersih menjadi persoalan yang mendesak karena menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Papua. Selain itu, pencapaian selanjutnya adalah terbentuknya *desk consulting* yang nantinya bermanfaat bagi pengembangan sanitasi dan air bersih yang lebih luas di Papua.

3. JICA (Japan International Cooperations Agency)

JICA merupakan badan kerjasama internasional Jepang yang berdiri pada tahun 1974. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk meningkatkan hubungan luar negeri Jepang dengan negara-negara dunia. JICA merupakan organisasi pemerintah, namun untuk mendukung netralitas dan efektifitas dari

misinya pada 1 Oktober 2003 ICA lepas dari pemerintah Jepang dan kemudian tampil sebagai organisasi yang mandiri.

Kolaborasi antara USAID dalam program sAIIG bersama JICA dijalankan melalui skema *Partnership Program (JPP)* atau Program Kemitraan JICA merupakan suatu program dukungan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* yang bertujuan mendorong pelaksanaan berbagai proyek pembangunan pada tingkat masyarakat akar rumput di berbagai negara berkembang yang diprakarsai oleh berbagai mitra pembangunan Jepang (khususnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi) yang memiliki teknologi dan pengalaman dalam pembangunan.

Proyek JPP ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di berbagai negara, karena berkaitan dengan tiga hal, yaitu :

- a. Dikategorikan sebagai kegiatan Kerjasama Teknik
- b. Dirancang sebagai suatu program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hajat hidup manusia sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya dalam rangka perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di berbagai negara berkembang
- c. Suatu program yang memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat Jepang untuk meningkatkan pemahamannya serta partisipasinya dalam kerjasama internasional.

4. USAID (*United States Agency of International Development*)

USAID merupakan lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bersifat independen yang didirikan pada 3 November 1961. Lembaga ini memberikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan dan barang-barang lain, termasuk bantuan bagi korban bencana alam, pemeliharaan kesehatan seperti: vaksinasi, imunisasi, perlindungan dari aids, gizi untuk ibu dan anak juga pelayanan program keluarga berencana. USAID di Indonesia sendiri telah mulai beroperasi sejak tahun 1950-an dan memiliki beberapa program diantaranya program transisi menuju demokrasi, perbaikan ekonomi dan sistem finansial, perluasan lapangan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta jaminan pangan untuk kelompok masyarakat tertentu.

USAID merupakan organisasi bantuan asing pertama yang menekankan bantuannya pada bantuan jangka panjang dan gerakan sosial. Bantuan-bantuannya ini terbebas dari unsur politik dan militer sehingga USAID bisa langsung memberikan bantuannya kepada negara-negara berkembang di dunia. Tujuan dari didirikannya USAID sendiri yaitu untuk memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan oleh negara-negara didunia ini dan membantu negara-negara didunia ini dalam mempertahankan kemerdekaan mereka

Melalui investasi dengan target yang telah ditetapkan dan memanfaatkan keunggulan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, USAID bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, tokoh daerah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil dan para mitra untuk mengatasi tantangan pembangunan, mulai dari memperkuat demokrasi yang adil dan bertanggung jawab hingga memenuhi

kebutuhan masyarakat Indonesia yang paling rentan, termasuk pada persoalan sanitasi dan air bersih.

Beberapa wujud kolaborasi antara AUSAID dan USAID dalam kerangka sAIIG adalah *Indonesian Urban Water, Sanitation and Hygiene* (IUWASH) dan *Initiative for Water and Sanitation Improvement through Networking Support* (IWINS) tahun 2016. Program ini akan berfokus pada pembangunan sumur resapan untuk membantu mengisi kembali lapisan akuifer. Air di dalam akuifer akan mengalir ke mata air yang menjadi sumber utama air baku untuk wilayah Papua. Sementara itu, program IWINS akan berfokus pada upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air yang aman dan fasilitas sanitasi komunal di wilayah Papua.

Melalui uraian di atas maka dapat difahami bahwa kerjasama antara Australia dan Indonesia melalui SAIIG diwujudkan melalui bantuan teknis dan program, serta anggaran. Implementasi dari program ini diwujudkan oleh Kementerian Pekerja Umum dan berbagai stakeholder lainnya, sedangkan pihak Australia hanya menekankan pada aspek politik meliputi pembahasan pada rapat koordinasi dan dukungan program-program. Kemudian kolaborasi dengan organisasi internasional merupakan titik temu, diantara keduanya. Kerjasama Indonesia dan Australia pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sanitasi dan air bersih, meskipun belum dapat menjadi solusi yang bersifat mendasar.

Kesimpulan

Adanya dukungan dari pemerintah Australia melalui sAIIG dalam mendukung penyelesaian masalah sanitasi dan air bersih menjadi bagian dari titik temu atas persamaan kepentingan kedua belah pihak. Ini penting karena masalah ini menjadi bagian penting dari pencapaian MDG,s (*millenium development goals*). Dalam menjalankan agendanya, sAIIG menggunakan pendekatan peran organisasi internasional, diantaranya melalui dukungan program dan teknis. Upaya ini berkaitan dengan dengan sistemisasi dan alih teknologi air bersih yang dipromosikan oleh pihak Australia yang nantinya dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi di Papua.

Daftar Pustaka

Buku

Dougherty, James E., dan Robert L Pfaltzgraff, Jr, *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey*, 4th. Ed Addison Wesley Longman, New York, 1997.

Elwell, Frank W., *A Commentary on Malthus 1789 in Essay on Population As Social Theory*, Carnegie Mellon Publishing, Pittsburg-Pensylvania, 2001.

Forsythe. David P. and Maxim Baer, *The International Relations in New Globalization Disorder*, London and New York : Palgraff Mc Millan, 2013.

Huntington, Samuel, *Democracy and Authority*, Penguin Book, London, 2004.

Keodatie, Eovert J. dan Roestam Sjarif, *Tata Ruang Air*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Malthus, Thomas Robert and John Pullen, *Principles of Political Economy*, Cambridge University Press, 2004.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Cetakan Pertama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Peter Shearman, *The Relations of Indonesia and Australia : Between Old and New Agenda*, Melbourne University Press, Melbourne, 2012.

Soeprapto, R. *Hubungan Internasional: Sistem Interaksi dan Perilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Laporan dan Laporan

Anonim, Australian Aid Report to Indonesia Patnership” Australian Embassy Paper Report, Jakarta, 2016.

Australian Governemnt Paper Repor, “Overview of Australian Aid Program to Indonesia”, Australian Departement of Foreign Relations and Trade, Barton-Canberra, 2011.

Fulazaky, MA. “Chalanged of Integrated Water Resources Water on Indonesia” *The Journal of Water Management*, Vol VI, Kuala Lumpur, 2015.

Kapisa, Noak, “Laporan Pemantauan Kualitas Air Bersih di Provinsi Papua”, Laporan BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Provinsi Papua, Jayapura, 2015.

Laporan Bappenas, “Analisis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2015”, Bappenas, Jakarta, 2015.

Laporan, “Ikhtisar Program Bantuan Luar Negeri Australia Untu Indonesia”, Kedutaan Australia, Jakartam 2015.

Surat Kabar

“Provinsi Papua Kembali Hadapi Wabah Diare”, *Republika*, 22 Juni 2016.

“Jokowi Minta JICA Danai Proyek di Luar Jawa”, *Republika*, 27 Juli 2016.

“USAID Dukung Penyediaan Air Bersih di Papua”, *Kompas*, 8 Juli 2016.

“Anggaran Pembangunan Papua Semakin Meningkat”, *Kompas*, 9 Maret 2014.

Internet (web site)

“Air dan Sanitasi di Indonesia”, diakses dari <http://kophi.or.id/air-dan-sanitasi-di-indonesia/>, pada tanggal 19 Oktober 2017.

- “Indonesian Water Crisis”, diakses dari <https://water.org/our-impact/indonesia/>, pada tanggal 19 Oktober 2017.
- “Satker Provinsi Kalimantan Tengah, Peduli Sanitasi di Palangkaraya”, diakses dari <http://ciptakarya.pu.go.id/water/post.php?q=7194-Satker-PSPLP-Provinsi-Kalimantan.html>, pada tanggal 19 Oktober 2017,
- “Air Bersih, Sanitasi dan Kebersihan”, diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/id/A8_-_B_Ringkasan_Kajian_Air_Bersih.pdf, pada tanggal 19 Oktober 2017.
- “WHO MDGS 7 : Ensure Sustainable Environment”, diakses dari http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/mdg7/en/, pada tanggal 2 November 2017.
- “Indonesia : Negara Dengan Sanitasi Terburuk Kedua Dunia”, dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/indonesia-negara-dengan-sanitasi-terburuk-kedua-di-dunia>, diakses pada tanggal 14 November 2017.
- “Beberapa Masalah Sanitasi di Indonesia”, dalam <http://www.indonesian-publichealth.com/masalah-sanitasi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 November 2017.
- “Papua, Ini Wilayah Dengan Sanitasi Terburuk di Indonesia”, dalam <https://gaya.tempo.co/read/671936/papua-ini-kota-dengan-sanitasi-terburuk-se-indonesia>, diakses pada tanggal 10 November 2017.
- “Sanitasi Indonesia : Universal Acces”, dalam http://www.sanitasi.or.id/?page_id=282, diakses pada tanggal 20 April 2018.
- “Program Percepatan PPSP”, dalam <http://www.ampl.or.id/program/program-percepatan-pembangunan-sanitasi-permukiman-ppsp-1>, diakses pada tanggal 21 April 2018.
- “Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Pengembangan Jalan Raya Air Bersih dan Sanitasi”, dalam <https://indonesiana.tempo.co/read/110510/2017/04/15/salmamemel/infrastruktur-air-bersih-sanitasi-jalan-dan-transportasi-serta-australia-indonesia>, diakses pada tanggal 19 April 2018.
- “Australian Aid : Indonesian Infrastructure Initiative Program Sanitasi dan Air Bersih”, dalam <http://www.indii.co.id/index.php/id/program-indo/air-dan-sanitasi>, diakses pada tanggal 20 April 2018.
- “Australia Economy and Bussines”, dalam <https://www.theguardian.com/business/australia-economy>, diakses pada tanggal 20 April 2018.

- “Indonesian and ADB”, dalam <https://www.adb.org/countries/indonesia/main>, diakses pada tanggal 20 April 2018.
- “Bank Dunia dan ADB di Sektor Air”, dalam http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/10/148/Hutang_di_Sektor_Air/Bank_Dunia_dan_ADB_di_Sektor_Air.html, diakses pada tanggal 19 April 2018.
- “About the World Bank”, dalam <http://www.worldbank.org/en/about>, diakses pada tanggal 21 April 2018.
- “Bank Dunia Dukung Ekspansi Penyediaan Air Minum dan Saitasi di Indonesia”, dalam <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2013/05/02/world-bank-to-help-scale-up-water-sanitation-coverage-in-indonesia>, diakses pada tanggal 20 April 2018.
- “JICA Profile”, dalam https://www.jica.go.jp/english/publications/brochures/pdf/jicaprofile2010_01.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2018.
- “Program Kemitraan JICA Indonesia”, dalam <https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/activities/activity03.html>, diakses pada tanggal 22 April 2018.
- “USAID History”, dalam <https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history>, diakses pada tanggal 17 April 2018.
- “Sanitasi dan Air Bersih”, dalam <http://www.tanotofoundation.org/enhancement/id/enhancing-the-quality-of-life-id/community-water-sanitation-id/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
- “Perlu Aksi Nyata Demi Air Bersih dan Sanitasi”, dalam <https://indonesiana.tempco.co/read/110415/2017/04/15/Perlu-Aksi-Nyata-Demi-Air-Bersih-dan-Sanitasi>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.
- “Masalah Otonomi Khusus Papua”, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8c3cabba8dc/masalah-otonomi-khusus-papua>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.
- “Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur di Papua”, dalam <http://www.presidentri.go.id/program-prioritas-2/pemerintah-genjot-pembangunan-infrastruktur-di-papua.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018.
- “Akses Air Bersih Jadi Tantangan”, dalam <http://mediaindonesia.com/news/read/75197/akses-air-bersih-jadi-tantangan/2016-11-02>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018.

“Sejarah Indonesia-Australia”, dalam <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

“Australia-Indonesia Relationship”, dalam <https://thediplomat.com/tag/australia-indonesia-relations/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.

“Kemitraan Kerjasama Australia Indonesia”, dalam <http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html>, diakses pada tanggal 2 April 2018.

“Socialisation of Indonesia-Australia : Grant For Sanitation”, dalam <http://www.indii.co.id/index.php/id/events/sosialisasi-of-australia-indonesia-infrastructure-grant-for-sanitation-saiig>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

“Concept Peer Review : Australia-Indonesia Infrastructure Grant”, diakses dari <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/water-grants-phase2-concept-note-pd.pdf>, pada tanggal 24 Februari 2018.